# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini terbagi atas beberapa sub-bab. Pertama merupakan landasan teoritis yang akan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan seperti perpajakan secara umum hingga variabel independen dan variabel dependen. Teori-teori tersebut mengacu dari beberapa buku maupun jurnal terkait variabel yang diteliti.

Selanjutnya pada bab ini akan membahas mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang diperoleh dari tulisan di jurnal yang menjadi dasar bagi penulis dalam melakukan penelitian ini. Setelah itu akan dibahas pula mengenai kerangka pemikiran yang berisi pola pikir pada variabel-variabel yang akan diteliti. Terakhir, hipotesis yang berisi anggapan sementara yang akan dibuktikan di dalam penelitian ini.

## Tinjauan Pustaka

### Pengertian Pajak

Definisi pajak berasal dari Bahasa Jawa yaitu “*ajeg*” yang berarti pemungutan teratur pada waktu tertentu. Lalu *pa-ajeg* artinya pungutan teratur terhadap hasil bumi berdasarkan presentase tertentu yang dilakukan oleh pengurus desa (Rahayu, 2017: 25). Menurut P. J. A Adriani (Rahayu, 2017: 26) pajak adalah iuran yang dilakukan masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang bagi pihak yang wajib membayarnya menurut peraturan yang berlaku dengan tidak mendapat prestasi kembali dimana kegunaannya untuk membiayai pengeluaran yang berhubungan dengan negara.

Selain itu definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 pajak merupakan suatu kontribusi yang bersifat wajib kepada negara yang terutang dan dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dimana tidak memperoleh imbalan secara langsung serta dapat digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyatnya. Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri penting pada pengertian pajak adalah (Mardiasmo, 2018: 1):

1. Iuran yang berasal dari rakyat untuk negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak ditujukan untuk pembiayaan pengeluaran rumah tangga negara oleh pemerintah, dimana dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

### Fungsi Pajak

Dalam pembangunan suatu negara yang dapat terealisasi dengan baik maka pajak memiliki fungsi (Rahayu, 2017: 31) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Sebagai fungsi *budgetair* pajak digunakan dalam rangka memenuhi biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah. Dalam hal ini pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tingkat optimalisasi berupa penerimaan negara dari rakyatnya tanpa timbal balik secara langsung dari negara berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak.

1. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Kegunaan pajak selain sebagai kas negara, tetapi dapat juga sebagai wujud pemerintah dalam ikut andil untuk mengatur perekonomian masyarakat. Fungsi *Regulerend* juga sering disebut fungsi tambahan atas fungsi utama yaitu fungsi *budgetair*.

1. Fungsi Stabilitas

Fungsi ini digunakan pemerintah sebagai alat untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga tingkat inflasi yang terjadi dapat dikendalikan. Inflasi merupakan proses dimana harga meningkat yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Dengan adanya peningkatan konsumsi masyarakat akan menyebabkan peningkatan pada penerimaan pajak terhadap negara, baik Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Penghasilan.

1. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Dalam hal ini pajak digunakan sebagai pembiayaan pembangunan yang dimana akan membuka kesempatan kerja baru sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### Asas-Asas Pemungutan Pajak

Agar tercapainya pemungutan pajak maka perlu adanya keserasian dengan tujuan dan asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam (Ritonga, 2017: 52) diantanya :

1. Asas *equality*

Pada asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus bersifat adil dan merata dan harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diterima. Pengenaan pajak kepada objek pajak harus seimbang, tidak boleh adanya sikap diskriminasi.

1. Asas *Certainty*

Asas ini menganut bahwa penetapan pajak tidak seharusnya bersifat sewenang-wenang, dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebanan pajak yang dilakukan tidak seharusnya mengenal kompromi.

1. Asas *Convenience*

Pajak merupakan beban bagi pihak yang berkewajiban. Pemungutan pajak yang dilakukan seharusnya tidak membebani bagi pihak yang berkewajiban, maka kewajiban perpajakan seharusnya dapat dilakukan sesederhana mungkin.

1. Asas *Efficiency*

Tujuan dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah adalah penerimaan negara, maka pemungutan pajak yang dilakukan harus seefisien mungkin. Sehingga menghindari adanya pengeluaran biaya yang lebih besar atau sama dengan pajak yang dipungut.

Lalu asas keadilan dalam pemungutan pajak dapat dibagi menjadi asas falsafah hukum, asas yuridis, asas ekonomis, dan asas pemungutan pajak (Ritonga, 2017: 55) diantaranya:

1. Asas falsafah hukum
2. Teori asuransi

Pada teori ini menyatakan bahwa tugas negara adalah memberikan perlindungan, pengaturan, dan pelayanan kepada masyarakat dari berbagai macam kepentingan maupun keamanan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu diperlukan adanya perjanjian dalam pembayaran premi. Premi yang dimaksud adalah untuk memperoleh keamanan dari negara dimana rakyat berlindung.

1. Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang dipungut harus sebanding dengan besarnya tugas pemerintah untuk memberikan perlindungan yang seharusnya. Kelemahan dari teori ini adalah tidak ada standar yang mengukur kepentingan seseorang yang membayar pajak besar atau kecil dan orang yang membayar pajak.

1. Teori Gaya Pikul

Teori ini mengandung maksud bahwa semakin besar penghasilan seseorang maka makin besar juga kemampuan daya pikulnya, karena beban pajaknya juga semakin besar. Contohnya: Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

1. Teori Bakti

Teori bakti dapat disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak. Di sisi lain masyarakat menyadari bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban dalam membuktikan tanda baktinya terhadap negara.

1. Teori Asas Daya Beli

Teori ini memandang tingkat daya beli seseorang tanpa memperhatikan besarnya penghasilan. Pemungutan pajak sebagai cara dalam memanfaatkan gaya beli dari masyarakat untuk kepentingan negara. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan.

1. Asas Yuridis

Pada asas ini pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Sebaliknya, pemungutan pajak yang dilakukan tanpa adanya dasar hukum merupakan suatu bentuk tindakan yang melanggar hukum. Dalam hal ini dibutuhkan kerahasiaan pajak mengenai data wajib pajak yang diperoleh dengan pemenuhan kewajiban pajaknya.

1. Asas Ekonomis

Pada asas ini merupakan suatu pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat agar terus meningkat. Sehingga pemungutan pajak harus selalu diupayakan sehingga tidak menghambat kelancaran ekonomi. Menurut Rochmat Soemitro syarat-syarat ekonomis yaitu:

1. Pajak yang dibayar kepada negara berasal dari penghasilan rakyat.
2. Pajak sebaiknya dapat ditagih pada saat yang tepat.
3. Pajak tidak seharusnya memberikan kerugian bagi masyarakat.
4. Pajak tidak seharusnya menghalangi perdagangan serta perindustrian.

### Cara Pemungutan Pajak

Dalam suatu negara mengenal tiga macam sistem pemungutan pajak yaitu *official assessment system, self assessment system, dan withholding system* (Abuyamin, 2015 : 37). Sistem-sistem ini dalam pemungutannya harus ditaati baik oleh fiskus maupun wajib pajak.

1. Sistem Pemungutan Pajak
2. *Official Assessment system*

Pada sistem ini pemerintah (fiskus) yang menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari sistem ini adalah:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Hutang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.
4. *Self Assessment System*

Dengan sistem ini pemungutan pajak yang dilakukan memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawabnya kepada wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Dalam self assessment system, pemerintah (fiskus) hanya mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak di bidang perpajakan.

Sehingga seluruh pelaksanaan dalam sistem ini bergantung pada sikap kesadaran, kepatuhan, dan kejujuran wajib pajak. Dengan demikian maka dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya harus sesuai dengan penegakan Hukum Pajak bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pajaknya.

1. *Withholding System*

Pada sistem ini pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga dalam memotong maupun memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari sistem ini adalah:

1. Pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga (bukan dari pemerintah).
2. Pemotong atau pemungut wajib menyetorkan hasil pemotongan atau pemungutan pajak.
3. Pemerintah mengawasi pelaksanaan pemotongan atau pemungutan serta penyetoran pihak ketiga.

### Tingkat Pengetahuan Administrasi Pajak

Dalam hal ini tingkat pengetahuan administrasi pajak mengacu pada kewajiban wajib pajak dalam menerapkan prinsip *self assessment*. *Self*  artinya sendiri, sedangkan *to assess* artinya menilai, menghitung, menaksir. Menurut (Waluyo, 2017) Berikut ini merupakan tata cara dalam melaksanakan kewajiban pajak yang menerapkan prinsip *self assessment system*:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas diri wajib pajak dalam memperoleh hak serta melakukan kewajiban dalam pajak. Selain sebagai identitas diri, NPWP juga dapat digunakan oleh pemerintah (fiskus) dalam melakukan pengawasan khususnya pada saat melakukan pembayaran pajak. Dalam hal ini wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif maupun obyektif wajib untuk mendaftarkan diri agar memperoleh NPWP. Persyaratan subyektif berisi ketentuan mengenai subyek pajak yang terdapat dalam UU Pajak Penghasilan. Sedangkan persyaratan obyektif merupakan pemotongan atas penghasilan yang telah diterima oleh subyek pajak tersebut.

Bagi calon wajib pajak dapat mendaftarkan dirinya melalui Kantor Pelayanan Pajak. Kemudian bagi wajib pajak usahawan wajib melaporkan usahanya meliputi tempat tinggalnya serta tempat kegiatan usaha tersebut berlangsung. Selain melalui Kantor Pelayanan Pajak, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan oleh calon wajib pajak melalui sistem *e-registration*. Sistem ini dapat terhubung secara *online* dengan Direktorat Jenderal Pajak.

1. Melakukan Penghitungan pajak

Cara menghitung pajak Penghasilan adalah dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak tersebut dengan tarif pajaknya. Pada dasarnya dalam menentukan besarnya penghasilan dapat dilakukan atas dasar pembukuan maupun pencatatan. Tetapi bagi wajib pajak yang memiliki omzet tertentu hanya melakukan pencatatan.

Dalam melakukan penghitungan atas Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak orang pribadi yaitu dengan mengurangi penghasilan yang merupakan objek pajak dengan biaya-biaya dan PTKP.

1. Melakukan Pembayaran Pajak

Dalam melakukan pembayaran wajib pajak dapat menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilakukan di kantor pos. Melalui kewenangan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan menetapkan bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran pajak terutang paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Jika terjadi keterlambatan maka akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran hingga tanggal dilakukannya pembayaran.

Jika wajib pajak melakukan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak, maka sesuai dengan Peraturan nomor 184/PMK.03/2007 sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan paling lama 9 (Sembilan) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon, ditunda, dan diangsur.
2. Jika batas waktu 9 (Sembilan) hari kerja tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak maka permohonan masih dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak sepanjang wajib pajak dapat membuktikan keadaan yang sebenarnya.
3. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan atas permohonan berupa menerima sebagian, seluruhnya, atau bahkan menolak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
4. Bila jangka waktu pada butir 3 lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan dianggap diterima
5. Surat keputusan yang menerima sebagian atau seluruhnya dengan jangka waktu masa angsuran dan penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan pertimbangan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan wajib pajak
6. Mengenai utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan dimaksud tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
7. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan, melakukan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.. Jenis-jenis SPT antara lain:

1. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)

SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan pemenuhan pembayaran pajak untuk masa 1 tahun pajak. Bagi wajib pajak orang pribadi usahawan menggunakan jenis SPT Tahunan dengan formulir 1770.

1. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)

SPT Masa merupakan surat pemberitahuan pemenuhan atas pembayaran pajak untuk masa kurang dari 1 tahun dalam tahun berjalan. SPT masa wajib dilaporkan dalam periode setiap bulan, yang terdiri dari SPT Masa Pajak Penghasilan, SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

1. Melakukan Pencatatan

Berikut ini merupakan kewajiban pencatatan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 / PMK.03 / 2007 yang meliputi:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai dengan norma penghitungan penghasilan netto
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha.
3. Pencatatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, serta disusun menggunakan Bahasa Indonesia.
4. Pencatatan dalam tahun tersebut dilakukan secara kronologis.
5. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan disimpan dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun.
6. Pencatatan yang dilakukan mencerminkan jumlah bruto yang diterima, penghasilan yang bukan objek pajak dan bersifat final.
7. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu jenis usaha maka pencatatan yang dilakukan harus dapat menggambarkan secara jelas masing-masing jenis usaha tersebut.
8. Wajib Pajak Orang Pribadi melakukan pencatatan atas dasar harta dan kewajiban.

Selain kewajiban pencatatan yang telah diuraikan diatas, berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur mengenai kerahasiaan serta sanksi dalam pembukuan dan pencatatan yaitu sebagai berikut:

1. Memperlihatkan pembukuan dan pencatatan yang palsu atau dipalsukan yang tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya
2. Tidak melakukan penyelenggaraan atas pembukuan dan pencatatan di Indonesia yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak dan kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
3. Tidak menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang termasuk hasil pengelolaan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik.

### Religiusitas

Di Indonesia pajak menurut teori keagamaan dapat dipahami menurut kepercayaannya masing-masing. Menurut sudut pandang Islam (dalam Tim Edukasi Pajak Direktorat Jenderal Pajak Dikti 2016) menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang berdasarkan pada *ijtihad Ulil Amri* yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan persetujuan ulama. Objek Pajaknya adalah harta atau penghasilan setelah terpenuhinya kebutuhan pokok, seperti halnya zakat. Dalam ajaran islam, kewajiban utama kaum muslim atas harta adalah zakat. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Berikut merupakan karakteristik pajak menurut syariat adalah sebagai berikut:

1. Pajak bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu.
2. Pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.
3. Pajak hanya diambil dari kaum muslim, dari non Muslim dipungut Jizyah.
4. Pajak hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya.
5. Pajak hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
6. Pajak dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.

Kedua, menurut sudut pandang Kristen menurut (Tambunan dkk, 2006) menjelaskan bahwa pajak dalam konteks alkitab adalah kewajiban seluruh penduduk yang diberikan kepada raja dari penghasilannya berupa emas, uang, lembu, dan penghasilan yang diperoleh dari ladang gandum dan anggur. Dalam kitab perjanjian lama pajak dikenal dengan istilah “upeti”. Sementara dalam kitab perjanjian baru kata pajak yaitu “kensos” yang berarti tangguhan wajib penduduk perkepala. Lalu dalam melaksanakan kewajiban pajak, maka manusia perlu kehadiran seorang pemimpin dalam mengelola pajak. Berikut merupakan sikap yang sebaiknya dilakukan oleh wajib pajak agar tujuan pemungutan pajak dapat tercapai, diantaranya:

1. Wajib pajak perlu mengubah paradigma dalam berpikir. Wajib pajak perlu memandang bahwa pajak yang mereka bayar adalah untuk menolong orang lain. Dalam injil Yakobus 2:17 dikatakan bahwa umat kristiani harus berada pada barisan terdepan dalam membayar pajak.
2. Wajib pajak bersikap jujur. Pada saat penghasilan yang diperoleh seseorang meningkat maka pajak yang dibayarkan tentunya meningkat juga. Dalam hal ini sikap jujur berperan penting.

Tetapi tanpa adanya kesadaran dalam membayar pajak, maka hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya tidak dapat terwujud. Maka, gereja berperan dalam hal:

1. Senantiasa tidak menutup diri dalam hal mendukung dan mendorong warga untuk aktif dalam membayar pajak.
2. Terlibat dalam menjelaskan peranan pajak melalui pandangan agama.
3. Memberikan dukungan melalui gerakan peduli pajak.
4. Bersikap kritis dengan cara bertanggungjawab moral terhadap petugas pajak.
5. Memberikan pendampingan rohani kepada anggota yang ditempatkan pada pemerintah.

Ketiga, menurut sudut pandang Budha (dalam Tim Edukasi Pajak Direktorat Jenderal Pajak Dikti 2016) menyatakan bahwa istilah mengenai pajak terdapat dalam ajaran Sang Budha kepada *Anathapindika* dalam *Vyagapajjha Sutta*. Kepada Anathapindika Sang Buddha berkata:

“Kekayaan yang diperoleh melalui usaha giat, yang dikumpulkan melalui lengannya, yang didapatkan melalui keringat di dahinya, harta yang layak yang didapatkan dengan cara yang layak, sang siswa suci melakukan empat perbuatan bajik” Sang Buddha menekankan“ Kembali, Perumah Tangga, dengan kekayaan tersebut, seorang perumah tangga dapat melakukan lima macam hal yaitu: persembahan kepada sanak keluarga; para tamu; para leluhur; raja, serta para dewa. Inilah perihal dari kekayaan yang dipergunakan dengan baik” Persembahan kepada raja sebagaimana dimaksud, dalam hal ini adalah persembahan kepada negara yang sekarang ini diimplementasikan melalui pajak.

Sementara *Vyagapajjha Sutta* artinya tujuan hidup manusia yang masih diliputi oleh kehidupan duniawi dan bagaimana caranya agar keinginan ini dapat dicapai. Jadi, jelaslah sekarang bahwa Sang Budha sama sekali tidak menentang terhadap kemajuan atau kesuksesan dalam kehidupan duniawi. Namun demikian kekayaan yang diperolehnya haruslah dengan cara-cara yang benar agar dapat memanfaatkan kekayaan tersebut dengan baik. Sebagai umat Buddha yang mamahami dan sekaligus mempraktikkan *Dharma* sebaiknya tidak diperbudak oleh material dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, kehidupan yang sedang dijalani sekarang ini akan menjadi bermakna, sehingga kita dapat memanfaatkan kekayaan secara tepat. Terkait dengan hal tersebut, dalam usaha mendukung tugas pokok pemerintahan, umat Budha yang sekaligus warga negara indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Contoh kewajiban tersebut adalah harus taat untuk membayar pajak sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan pajak yang terkumpul dipergunakan untuk pembangunan nasional dan sekaligus mensejahterakan masyarakat. Kita ketahui bahwa Sang Buddha juga memperhatikan kesejahteraan dalam kehidupan duniawi. Beliau tidak memandang kemajuan duniawi sebagai sesuatu yang benar jika hal tersebut hanya didasarkan pada kemajuan materi semata dengan mengabaikan dasar-dasar moral dan spiritual.

Keempat, menurut sudut pandang *Hindu* (dalam Tim Edukasi Pajak Direktorat Jenderal Pajak Dikti 2016) menyatakan bahwa pajak dapat dilihat melalui pandangan menurut *Kautilya*. Menurutnya, pajak berkaitan dengan politik dimana merupakan tugas suatu negara dalam menciptakan dan melindungi kesejahteraan, mendorong kemajuan ekonomi, dan menegakkan *Dharma*. Hal ini dapat terwujud apabila ketertiban dan stabilitas dapat terjaga. Stabilitas dalam suatu negara artinya perlu sikap adil dalam mendistribusikan kemakmuran rakyat dalam pajak. Dalam agama Hindu terdapat istilah *moksartham jagadhita* yang artinya pencapaian kondisi yang serasi, selaras, seimbang, dan harmonis antara jasmani dan rohani, lahir dan batin serta dunia dan akhirat. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian kondisi jasmani yang baik artinya dalam hal membayar pajak yang sudah menjadi kewajiban umat Hindu sehingga dapat membantu orang lain dalam mencapai kesejahteraan hidupnya.

Kelima,menurut sudut pandang *Khonghucu* (dalam Tim Edukasi Pajak Direktorat Jenderal Pajak Dikti 2016) menyatakan bahwa pajak dapat dilihat melalui pandangan menurut *Xunzi*. Menurutnya, hubungan antar manusia perlu diatur dengan baik oleh negara. Pengaturan itu termasuk dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pegawai pemerintah dan birokrasi berfungsi mengatur hubungan antar manusia agar tercipta ketertiban dan tidak mempersulit rakyat yang seharusnya dilayani. Lalu hubungan antar pribadi juga diatur dengan undang-undang tersendiri. Dalam hal ini manusia perlu membedakan hubungan individu dengan negara dan hubungan antara individu dengan individu. Hubungan individu dengan negara sudah diatur oleh hukum, misalnya kontribusi anggota masyarakat dalam pembangunan, berupa pembayaran pajak.

Kemudian, berikut ini merupakan unsur-unsur pembagian religiusitas Menurut Glock dan Stark dalam (Pamungkas, 2014) yaitu:

1. Pengetahuan, mengenai tingkat pengetahuan tentang ajaran agamanya dan kepercayaan atau keyakinan yang dianutnya.
2. Perasaan, berhubungan dengan perasaan mengenai kasih mengenai agamanya.
3. Perilaku, merupakan suatu kehadiran mengenai tempat ibadah, membaca kitab suci, dan berdoa.

Selain unsur-unsur diatas, Glock dan Stark membagi religiusitas menjadi 5 (lima) dimensi, yaitu:

1. *Religious Practice*

Dimensi ini merupakan suatu kegiatan ritual yang wajib dilaksanakan.

1. *Religious Belief*

Pada dimensi ini melihat sejauhmana kepercayaan yang dimiliki seseorang berdasarkan ajaran agamanya.

1. *Religious Knowledge*

Mengukur sejauh mana seseorang mengetahui dan memahami pengetahuan mengenai ajaran agamanya.

1. *Religious feeling*

Pada dimensi ini merupakan perasaan dan pengalaman berupa peristiwa keagamaan yang pernah terjadi dalam kehidupan seseorang.

1. *Religious Effect*

Pada dimensi ini mengukur perilaku seseorang berdasarkan motivasi ajaran agamanya.

### Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Soemitro, 1988) dalam Tim Edukasi Pajak Direktorat Jenderal Pajak Dikti mengatakan bahwa agar terciptanya kesadaran pajak, perlu adanya sikap tertarik (*tax madidness*) dalam membayar pajak yang dimana akan menumbuhkan rasa disiplin dalam membayar pajak. Selain itu, untuk membangun kesadaran membayar pajak berasal dari tingkah laku inklusi. Tingkah laku inklusi merupakan suatu tingkah laku yang digunakan sebagai pemuasan kebutuhan dalam berasosiasi, bergabung, dan mengelompokkan diri dengan orang lain. Dalam pajak, teori ini diasumsikan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan untuk membayar pajak dimana memiliki kebutuhan untuk diterima atau bergabung dengan kelompok pembayar pajak yang telah dicitrakan sebagai kelompok warga negara yang baik. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak (Rahayu, 2017: 191) yaitu:

1. Adanya sosialisasi pajak yang dilakukan .
2. Sikap berupa kualitas pelayanan pemerintah terhadap wajib pajak.
3. Kualitas individu wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak.
4. Tingkat pemahaman wajib pajak yang cukup.
5. Faktor ekonomi yang mempengaruhi kondisi wajib pajak.
6. Adanya persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

Dengan adanya sikap sadar dalam membayar pajak maka dapat juga menumbuhkan kepatuhan pajak. Sehingga penerimaan pajak yang diterima dapat digunakan dalam menunjang kesejahteraan masyarakatnya. Tingkat kesadaran yang tinggi dapat diukur oleh masyarakat melalui target penerimaan pajak yang tercapai, jumlah tagihan pajak serta pelanggaran yang dilakukan rendah, dan jumlah wajib pajak yang selalu meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif.

### Kepatuhan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di Indonesia menuntut wajib pajak untuk aktif sedangkan fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Dengan kondisi seperti ini maka dibutuhkan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan perpajakan ialah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua (Rahayu, 2017: 192) yaitu :

1. Kepatuhan perpajakan formal

Dalam hal ini wajib pajak memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal yang dimaksud adalah:

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun NPPKP.
2. Menyetorkan pajak yang terutang.
3. Melaporkan pajak yang telah dibayar dan melakukan perhitungan pajak.
4. Kepatuhan perpajakan material

Seorang wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan materialnya, meliputi:

1. Menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakannya.
2. Melakukan pemotongan dan pemungutan pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga).

Berikut merupakan kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/ KMK.04/ 2000, yaitu:

1. Tepat waktu untuk penyampaian SPT pada seluruh jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk seluruh jenis pajak, kecuali adanya izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman akibat tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Melakukan penyelenggaraan pembukuan dimana wajib pajak dilakukan pemeriksaan masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5% dalam jangka waktu 2 tahun terakhir.
5. Laporan keuangan wajib pajak yang diaudit oleh akuntan publik untuk 2 tahun terakhir dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapatan dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Selanjutnya akan dibahas mengenai faktor-faktor yang meningkatkan kepatuhan perpajakan (Rahayu, 2017: 196) yaitu:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara
2. Kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak
3. Kualitas penegakan hukum perpajakan
4. Kualitas pemeriksaan pajak
5. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan
6. Kemauan dan kesadaran wajib pajak

### Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Dengan perkembangan ekonomi seperti sekarang ini, UMKM merupakan suatu bentuk usaha yang penting. Menurut (Pandiangan, 2013) UMKM dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro merupakan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU UMKM.
2. Usaha kecil merupakan usaha milik perorangan atau badan usaha dan bukan suatu anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, dan menjadi bagian dari Usaha Menengah atau Besar yang diatur dalam UU UMKM.
3. Usaha Menengah merupakan usaha milik perorangan yang bukan suatu anak atau cabang perusahaan yang dimilki, dikuasai, dan menjadi bagian dari Usaha Kecil atau Besar dengan jumlah kekayaan bersih seperti yang diatur dalam UU UMKM.

Berikut ini merupakan kriteria UMKM dilihat dari aset dan besaran nilai omzet dalam setahun, antara lain:

1. Kriteria Usaha Mikro
2. Memiliki aset paling banyak sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Memiliki nilai omzet tahunan paling banyak sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
4. Kriteria Usaha Kecil
5. Memiliki aset lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
6. Memiliki nilai omzet tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) hingga paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
7. Kriteria Usaha Menengah
8. Memiliki aset lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) hingga paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
9. Memiliki nilai omzet tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) hingga paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

### Pengusaha Kecil

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/ PMK.03/2013 sebagai berikut:

1. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP dalam satu tahun buku dengan penerimaan usaha tidak lebih dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
2. Jika sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga memenuhi syarat sebagai PKP maka wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
3. Jika dalam hal kewajiban pada butir “b” diatas tidak dilaksanakan maka Direktur Jendral Pajak dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
4. Mengkukuhkan secara jabatan pengusaha yang terkait sebagai Pengusaha Kena Pajak.
5. Melakukan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau surat tagihan untuk masa pajak sebelum pengusaha dikukuhkan secara jabatan sebagai PKP terhitung sejak jumlah penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
6. Apabila pengusaha yang telah berstatus PKP dan telah dikukuhkan sebagai PKP ternyata jumlah penerimaan bruto dalam satu tahun buku tidak lebih dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapa ratus juta rupiah), berarti statusnya berubah menjadi Pengusaha Kecil dan mengajukan permohonan pencabutan surat pengukuhan sebagai PKP oleh KPP terkait diterbitkannya Surat Pecabutan Pengukuhan PKP.

Pengusaha yang telah menerima surat pencabutan pengukuhan PKP, ternyata jumlah penerimaan brutonya mengalami peningkatan menjadi lebih dari batasan peredaran usaha pengusaha kecil, sehingga memenuhi syarat sebagai PKP lagi, maksimal selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

## Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu**

|  |  |
| --- | --- |
| Peneliti | Lady Ayu Anggraeni |
| Tahun | 2017 |
| Judul | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, Dan Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak |
| Hasil Penelitian | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Religiusitas, dan Kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Lingkungan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak |
|  |  |
| Peneliti | Septiyani Nur Khasanah dan Amanita Novi Y |
| Tahun | 2016 |
| Judul | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Hasil Penelitian | Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. |
|  |  |
| Peneliti | Imang Dapit Pamungkas |
| Tahun | 2014 |
| Judul | Pengaruh Religiusitas dan Rasionalisasi dalam mencegah dan mendeteksi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi |
| Hasil Penelitian | Religiusitas berpengaruh negatif terhadap rasionalisasi dapat diterima, Religiusitas berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dapat diterima, Religiusitas berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi melalui Rasionalisasi tidak dapat diterima |
|  |  |
| Peneliti | Reny Eka Wati |
| Tahun | 2016 |
| Judul | Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Religiusitas yang dipersepsikan terhadap Kepatuhan Perpajakan |
| Hasil Penelitian | pengetahuan, modernisasi strategi Direktorat Jenderal Pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, sedangkan variabel sanksi perpajakan dan religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. |
|  |  |
| Peneliti | Nanik Ermawati |
| Tahun | 2018 |
| Judul | Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak |
| Hasil Penelitian | Religiusitas dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. |
|  |  |
| Peneliti | Lusiana Jayanti Sara dan Ery Rahmat |
| Tahun | 2013 |
| Judul | Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak |
| Hasil Penelitian | Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan Sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak |
|  |  |
| Peneliti | Sufiah dan Lintang Venusita |
| Tahun | 2017 |
| Judul | Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya |
| Hasil Penelitian | Religiusitas, Kesadaran, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan  perpajakan wajib pajak orang pribadi |
|  |  |
| Peneliti | Yani Febriani dan Kusmuriyanto |
| Tahun | 2015 |
| Judul | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak |
| Hasil Penelitian | Sikap Wajib Pajak secara parsial tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Pengetahuan tentang perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. |
|  |  |
| Peneliti | Sela Sukmana |
| Tahun | 2018 |
| Judul | Studi Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dan Religiusitas sebagai pemoderasi |
| Hasil Penelitian | Pendidikan pajak, Pemeriksaan pajak, dan Interaksi hubungan pengetahuan pajak dan religiusitas berpengaruh signifikan secara positif terhadap kepatuhan pajak. Pengetahuan pajak, Interaksi hubungan pendidikan pajak dan religiusitas berpengaruh signifikan secara negatif terhadap kepatuhan pajak. Religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. |

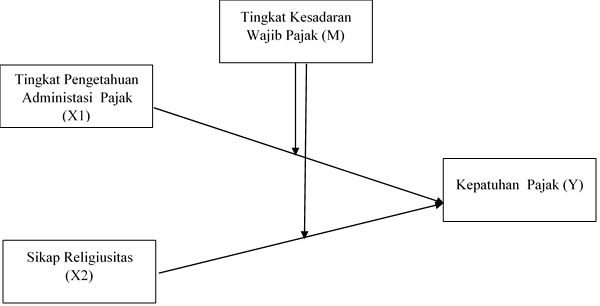
## 

## Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kerangka penelitian dapat digambarkan dalam bentuk diagram seperti berikut ini :

**Gambar 2.2**

**Kerangka Pemikiran**

****

### Tingkat Pengetahuan Administrasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak

Menurut (Putri & Setiawan, 2017) Tingkat Pengetahuan administrasi pajak yang mengacu pada kewajiban wajib pajak dalam menerapkan sistem *self assessment* merupakan ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak dari proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan melakukan pengaplikasikan pengetahuan itu dalam membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud adalah wajib pajak mengerti dan memahami mengenai tata cara perpajakan yang meliputi cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), melakukan pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Khasanah & Novi, 2013) dan (Febriani & Kusmuriyanto, 2015) pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Sikap Religiusitas berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak

Menurut (Sufiah & Venusita, 2017) religiusitas merupakan tingkat iman dan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenaiajaran agamanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa religiusitas merupakan seberapa jauh pengukuran seseorang dalam pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki mengenai pandangan agama dan ajarannya terhadap kegiatan sehari-hari di masyarakat dimana dalam wujud menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni, 2017) menunjukkan bahwa sikap religiusitas wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sikap religiusitas Wajib Pajak merupakan salah satu faktor penentu seberapa siap wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak memiliki tingkat religiusitas yang tinggi maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, dengan tingginya sikap religiusitas seseorang, maka dapat mencegah perilaku yang menyimpang.

### 3. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak memoderasi Tingkat Pengetahuan Pajak terhadapKepatuhanPajak Menurut (Artiningsih & Isroah, 2013) Kesadaran wajib pajak saling berhubungan dengan pengetahuan perpajakan. Aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak. Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak, tentunya akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan adanya sikap sadar, maka akan membentuk perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini dapat menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran wajib pajak dapat memoderasi Tingkat Pengetahuan Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.

### Tingkat Kesadaran Wajib Pajak memoderasi Sikap Religiusitas terhadap KepatuhanPajak Menurut (Sofha & Utomo, 2018) sikap religiusitas yang dimiliki oleh seseorang akan memberikan peningkatan nilai-nilai etika dalam menjalankan kehidupannya. Dimana hal ini akan memberikan dampak terhadap perilaku individu. Maka dapat disimpulkan bahwa dampak ini tentunya memberikan sikap yang positif bagi individu terhadap keadaan sekitarnya. Dengan adanya sikap positif ini tentunya individu tersebut memiliki kesadaran mengenai pentingnya membayar pajak. Dengan memiliki sikap sadar, maka kepatuhan pajak yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran wajib pajak dapat memoderasi Sikap Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak.

## Hipotesis

Ha1:Tingkat Pengetahuan Administrasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak.

Ha2 : Sikap Religiusitas berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak.

Ha3 : Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dapat memoderasi Tingkat Pengetahuan  
Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak .

Ha4 : Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dapat memoderasi Sikap Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak